

PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF STRUKTURAL FUNGSIONAL

Binti Maunah

IAIN Tulungagung

Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung

E-mail: uun.jilanur@gmail.com

Abstract: This article describes education position in the perspective of functional-structure. The researcher evaluated and compared various literatures including empirical sources from reseaches as document for review. Primary data were obtained from recent literatures searching in December 2015. Data were verified and discussed in a round table discussion and peer-debriefers, involving Islamic teachers team. Revisions were made after round table discussion aspiring comments and suggestions from the forums. The findings or analysis showed that (1) functional-structure theory focuses on social integration, social stability, value concensus emphasizing harmony perspective and equilibrium, and (2) Education in the functional-structure perspective is encouraged in line with social harmony, equality, and concensus among society to transform social values.

Keywords: education, functional-structure, harmony, equality.

Pendidikan mempunyai peranan menyiapkan sumber daya manusia yang mampu berpikir secara kritis dan mandiri (*independent critical thinking*) sebagai modal dasar untuk pembangunan manusia seutuhnya yang mempunyai kualitas yang sangat prima. Upaya pengembangan kemampuan berpikir kritis dan mandiri bagi peserta didik adalah dengan mengembangkan pendidikan partisipasif.

Pendidik baik guru maupun dosen seharusnya lebih berperan sebagai fasilitator, keaktifan lebih dibebankan kepada peserta didik. Keterlibatan peserta didik dalam pendidikan tidak sebatas sebagai pendengar, pencatat dan penampung ide-ide pendidik, tetapi lebih dari itu ia terlibat aktif dalam mengembangkan dirinya sendiri (Sadiman, 2004:3).

Pemikiran perspektif stuktural fungsional meyakini bahwa tujuan pendidikan adalah mensosialisasikan generasi muda menjadi anggota masyarakat untuk dijadikan tempat pembelajaran, mendapatkan pengetahuan, perubahan perilaku dan penguasaan tata nilai yang diperlukan agar bisa tampil sebagai bagian dari warga negara yang produktif (Sunarto, 1993:22). Dalam perspektif teori fungsional struktural ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan . perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain.

Pendekatan fungsional menganggap masyarakat terintegrasi atas dasar kata sepakat anggota-anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Masyarakat sebagai sistem

sosial, secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk ekuilibrium. Oleh sebab itu aliran pemikiran tersebut disebut *integration approach*, *order approach*, *equilibrium approach*, atau *structural functional approach* (fungsional struktural, fungsionalisme struktural) (Wirawan, 2006:42). Struktural fungsional para penganutnya mempunyai pandangan pendidikan itu dapat dipergunakan sebagai suatu jembatan guna menciptakan tertib sosial.

Pendidikan digunakan sebagai media sosialisasi kepada generasi muda untuk mendapatkan pengetahuan, perubahan perilaku dan menguasai tata nilai-nilai yang dipergunakan sebagai anggota masyarakat. Masyarakat dipandang sebagai suatu kesatuan, sebagai suatu kesatuan masyarakat itu dapat dibedakan dengan bagian-bagiannya, tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan. Dengan adanya anggapan masyarakat sebagai suatu realitas sosial yang tidak dapat diragukan eksistensinya, maka Durkheim memberikan prioritas analisisnya pada masyarakat secara holistik, dimana bagian atau komponen-komponen dari suatu sistem itu berfungsi untuk memenuhi kebutuhan utama dari sistem secara keseluruhan. Kebutuhan suatu sistem sosial harus terpenuhi agar tidak terjadi keadaan yang abnormal. Turner dalam Wirawan mengatakan bahwa sistem sosial dapat dibentuk untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan-tujuan tertentu sehingga mempunyai fungsi dalam membangun unsur-unsur kebudayaan masyarakat (Wirawan, 2006:48).

Dalam perspektif fungsional struktural, masyarakat sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Hubungan dalam masyarakat bersifat timbal balik dan simbiotik mutualisme. Secara dasar suatu sistem lebih cenderung kearah *equilibrium* dan bersifat dinamis. Ketegangan /disfungsi sosial /penyimpangan sosial/ penyimpangan pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui adaptasi dan proses institusionalisasi. Perubahan yang terdapat dalam sistem mempunyai sifat gradual dengan melalui penyesuaian dan bukan bersifat revolusioner. Konsensus merupakan faktor penting dalam integrasi .

Setiap masyarakat mempunyai susunan sekumpulan subsistem yang satu sama lain berbeda-beda, hal ini didasarkan pada struktur dan makna fungsional bagi masyarakat yang lebih luas. Jika masyarakat itu mengalami perubahan pada umumnya akan tumbuh dan berkembang dengan kemampuan secara lebih baik untuk menanggulangi permasalahan dan problem-problem dalam kehidupannya.

Secara umum fakta sosial menjadi pusat perhatian dalam kajian sosiologi adalah struktur sosial dan pranata sosial. Dalam perspektif fungsional struktural, struktur sosial dan pranata sosial tersebut berada dalam sistem sosial yang terdiri atas elemen-elemen ataupun bagian-bagian yang saling menyatu dan mempunyai keterkaitan dalam keseimbangan. Fungsional struktural menekankan keteraturan dan mengabaikan konflik serta perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat. Struktural fungsional menekankan pada peran dan fungsi struktur sosial yang menitik beratkan konsensus dalam masyarakat.

Jika hal ini dikaitkan dengan pendidikan maupun sekolah mempunyai beberapa fungsi antara lain: (1) Lembaga pendidikan merupakan sarana untuk bersosialisasi. Dalam lembaga pendidikan dapat merubah orientasi yang khas, salah satunya adalah cara berpandangan /berpikir dan juga mewarisi terhadap budaya yang dapat membuka wawasan baru terhadap dunia luar. Di dalam lembaga pendidikan pula terdapat perubahan yang diperoleh bukan hanya karena adanya keturunan maupun persaudaraan /hubungan darah, handai taulan,

kerabat dekat, teman sejawat dll. Tetapi terdapat juga peran yang dewasa yang diperoleh dengan penghargaan dan prestasi yang benar-benar terjadi; (2) Lembaga pendidikan merupakan ajang seleksi dan alokasi yang dapat memberikan semangat dan motivasi prestasi agar berguna dan dapat diterima dalam lapangan/ dunia pekerjaan dan dapat dialokasikan bagi mereka yang mendapatkan prestasi, dan (3) Lembaga Pendidikan memberikan kesempatan yang sama dalam hak maupun kewajiban tanpa adanya pandang bulu darimana dan siapa peserta didiknya,

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan studi ini adalah kepustakaan. Data primer diperoleh dari pembacaan buku-buku mutakhir. Kajian dilakukan pada bulan Desember 2015 dengan melibatkan teman sejawat dari tim guru pendidikan agama Islam. Pada tahap awal, penulis berupaya mengumpulkan materi dari berbagai teori fungsional struktural yang berkembang, kemudian disusun dalam bentuk naskah teks yang siap dibahas dalam peer group. Berdasarkan hasil diskusi *round table* dan berbagai masukan, kemudian naskah kajian diperbaiki, untuk dibahas pada diskusi tahap kedua. Hasil akhir diskusi kedua naskah kajian difinalisasi dan siap dipublikasikan dalam skala yang lebih luas.

HASIL DAN BAHASAN

Hakikat Pendidikan

Pendidikan dari bahasa adalah perbuatan mendidik (hal, cara dan sebagainya) dan berarti pula pengetahuan tentang mendidik atau pemeliharaan (latihan-latihan dan sebagainya) badan, dan batin (Poerwadarminto, 1991:250). Para pakar biasanya menggunakan istilah *tarbiyah*, dalam bahasa arab. Penggunaan kata *tarbiyah* untuk arti pendidikan (*education*) merupakan pengertian yang sifatnya *ijtihad* (*interpretable*) (Nata, 2012:21). Hal yang sama diungkapkan oleh Abdul Mujib bahwa: Pendidikan dalam bahasa arab biasanya memakai istilah *tarbiyah*, *ta'lim*, *ta'dib*, *riyadhah*, *irsyad*, dan *tadris* (Mujib, 2006:10).

Adapun pendidikan dari segi istilah antara lain adalah: Pendidikan sebagai setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepatnya membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa (atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari dan sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa (Hasbullah, 2001:2). Hal senada juga dikatakan bahwa: Pendidikan merupakan rangkaian usaha membimbing mengarahkan potensi hidup manusia yang beruopa kemampuan-kemampuan dasar dan kemampuan belajar, sehingga terjadilah perubahan di dalam kehidupan pribadinya sebagai makhluk individual dan sosial serta hubungannya dengan alam sekitar di mana ia hidup (Arifin, 1993:54). Dalam hal ini Herman H Home dalam Arifin, mengatakan bahwa Pendidikan harus dipandang sebagai suatu proses penyesuaian diri manusia secara timbal balik dengan alam sekitar, dengan sesama manusia dan dengan tabiat tertinggi kosmos (Arifin, 1993:12). Kalau kita liat dari segi masa depan maka pendidikan juga terdapat proses humanissai seperti yang dikatakan oleh Idris

bahwa: Pendidikan pada hakekatnya menyangkut masa depan, peradaban manusia dan proses humanisasi (memanusiakan manusia) (Idris, 2012:2).

Selanjutnya Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional seperti yang dikutip oleh Abudin Nata, beliau mengatakan bahwa pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*) dan tumbuh anak antara yang satu dengan lainnya saling berhubungan agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupian anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya (Nata, 2012:43). Adapun rumusan pendidikan mempunyai inti: pendidikan adalah pemanusiaan anak dan pendidikan adalah pelaksanaan nilai-nilai (Driyakara, 1980:18).

Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas tahun 2003) dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengembalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-Undang Sisdiknas, 2003:2).

Pengertian Teori Struktural Fungsional

Struktural Fungsional dinamakan juga sebagai *fungsionalisme struktural*. Fungsionalisme struktural memiliki domain di teori Konsensus. Masyarakat dalam perspektif teori ini dilihat sebagai jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi dan bekerja secara teratur, menurut norma dan teori yang berkembang (Purwanto, 2008:12.) Struktural Fungsional adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituenya; terutama norma, adat, tradisi dan institusi (Idi, 2013:24). Teori ini juga merupakan bangunan yang bertujuan mencapai keteraturan sosial. Pemikiran Struktural Fungsional sangat terpengaruh dengan pemikiran biologis yaitu terdiri dari organ-organ yang mempunyai saling ketergantungan yang merupakan konsekwensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup.

Teori Fungsional Struktural menekankan pada unsur-unsur stabilitas, Integritas, Fungsi, Koordinasi dan Konsensus. Konsep fungsionalisme maupun unsur-unsur normatif maupun perilaku sosial yang menjamin stabilitas sosial. Teori fungsional menggambarkan masyarakat yang merupakan sistem sosial yang kompleks, terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling ketergantungan.

Parsons mengatakan bahwa teori-teori sosiologi modern tahun 1986, masyarakat akan berada dalam keadaan harmonis dan seimbang bila institusi/atau lembaga-lembaga yang ada pada masyarakat dan negara mampu menjaga stabilitas pada masyarakat tersebut. Struktur masyarakat yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan tetap menjaga nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka hal ini akan menciptakan stabilitas pada masyarakat maka hal ini akan menciptakan stabilitas pada masyarakat itu sendiri (Sidi, 2014).

Adapun menurut Geoge Ritzer bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang mempunyai kaitan dan saling menyatu dalam

keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain (Ritzer, 2004:v).

Menurut Kaplan dalam Kresna mengatakan bahwa Fungsionalisme mempunyai kaidah yang bersifat mendasar bagi suatu antropologi yang berorientasi pada teori, yakni metodologi bahwa kita harus mengeksplorasi ciri sistemik budaya, hal ini dikandung maksud bahwa kita harus mengetahui bahwa bagaimana keterkaitan antara instuisi-instuisi atau struktur-struktur suatu masyarakat sehingga membentuk suatu sistem yang bulat, akan tetapi biasanya klaim para fungsionalisme adalah metodologi untuk mengeksplorasi saling ketergantungan, disamping itu para fungsionalis menyatakan pula bahwa fungsionalisme merupakan Teori tentang proses kultural (Kresna, 2015:20).

Perspektif fungsionalisme ini menemukan dirinya sebagai fungsionalisme struktural yang fokus utamanya terhadap persyaratan fungsional atau kebutuhan dari suatu sistem sosial yang harus dipenuhi apabila sistem tersebut *survive* dan hubungannya dengan struktur. Sesuai dengan pandangan tersebut, suatu sistem sosial selalu cenderung menampilkan tugas-tugas tertentu yang diperlukan untuk mempertahankan hidupnya dan analisis sosiologi yang mencakup usaha untuk menemukan struktur sosial yang dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut atau yang dapat memenuhi kebutuhan sistem sosial tersebut.

Teori Struktural fungsional dikenal dengan teori *fungsionalisme* dan fungsionalisme struktural. Struktural Fungsional mempunyai dalam teorinya menekankan pada keteraturan. Teori ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial (*social system*) yang terdiri dari bagian-bagian yang terkait dan menyatu dalam keseimbangan. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap struktur maupun tatanan dalam sistem sosial akan berfungsi pula pada yang lain, sehingga bila tidak ada fungsional, maka stuktur ini tidak akan hilang dengan sendirinya. Stuktur dan tatanan adalah merupakan fungsional bagi masyarakat tertentu. Teori ini cenderung memusatkan kajiannya pada fungsi dari suatu fakta sosial (*social fact*) terhadap fakta sosial lain. Talcott Parson maupun Robert K Merton dianggap sebagai *struktural fungsionalist* perspektif (*perspektif functionalism*) karena dua alasan, yaitu (1) menjelaskan hubungan fungsionalis dengan pendahulunya, terutama Durkheim, Brown dan Malinowski; (2) tokoh aliran ini menyebutnya dengan istilah fungsionalisme (Mere, 2007:90).

Teori fungsional Struktural yang sering disebut dengan teori integrasi atau teori konsensus yang dilahirkan oleh pemikir-pemikir klasik, diantaranya Socrates, Plato, Augus Comte, Spencer, Emile Durkheim, Robert K Merton dan Talcot Parson. Mereka membicarakan bagaimana perspektif fungsionalisme memandang dan menganalisis fenomena sosial dan kultural. Langkah-langkah utama dalam elaborasi teori sosial yang menghadang aktor-aktor sosial yang meletakkan tantangan-tantangan yang dihadapi sistem-sistem sosial bila ingin stabilitas sosial selalu terjaga.

Adapun fungsionalisme modern sumbernya adalah Augus Comte, Spencer, Pareto, Emile Durkheim dan ahli antropologi seperti Radcliffe, Brown dan Malinowwski. Pelopor yang menekankan pada hubungan interdependen antara bagian-bagian dalam sistem sosial antara lain adalah: Augus Comte, Spencer dan Pareto. Pendapat Comte bahwa terdapat hubungan ketergantungan antara bagian-bagian dalam sistem sosial. Jika hubungan keharmonisan antara keseluruhan dan bagian-bagian tersebut terganggu, maka sistem tersebut

akan mengalami suatu keadaan patologis. Penekanan pada integrasi dan solidaritas integrasi dan solidaritas di tekankan oleh Durkheim.

Teori struktural fungsional menganggap bahwa masyarakat adalah sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Teori ini memusatkan perhatian pada integrasi sosial, stabilitas sosial dan konsensus nilai (Nata, 2012:338). Strukturalisme dari segi lingualistik, menekankan pengkajiannya kepada segala hal yang menyangkut pengorganisasian bahasa dan sistem sosial. Fungsionalisme struktural atau analisa sistem pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep, tetapi yang paling menonjol adalah konsep dalam berbagai bidang kehidupan manusia baik secara individu maupun kelompok yang dapat menunjukkan kepada aktifitas dan dinamika dalam mencapai tujuan kehidupan. Apabila dilihat dari tujuan hidup, semua kegiatan-kegiatan manusia merupakan fungsi dan dapat berfungsi. Secara kualitatif maupun kuantitatif fungsi-fungsi itu dapat dilihat dari manfaat, faedah dan kegunaan secara individu maupun kelompok, organisai serta asosiasi yang ada.

Fungsi menunjuk pada suatu proses yang akan maupun sedang berlangsung, yaitu menunjukkan pada benda-benda tertentu yang merupakan elemen maupun bagian dari proses-proses tersebut, sehingga terdapat perkataan “masih berfungsi” atau “tidak berfungsi”. Fungsi-fungsi itu tergantung pada predikatnya, contohnya fungsi gedung, fungsi istana, fungsi lapangan, fungsi rumah, fungsi mobil maupun fungsi organisasi-organisasi tertentu.

Michael J. Jucius mengatakan bahwa: Fungsi sebagai aktifitas yang dilakukan oleh manusia dengan harapan dapat tercapai apa yang diinginkan (Idi, 2011:6). Secara umum teori Struktural fungsional mengemukakan konsep tentang tindakan sosial (*social action*) yang mempunyai anggapan bahwa perilaku sukarela mencakup beberapa elemen pokok, yaitu: (a) aktor sebagai individu, (b) aktor memiliki tujuan utama yang dicapai, (c) aktor memiliki berbagai cara untuk melaksanakan tujuan tersebut, (d) aktor dihadapkan pada berbagai kondisi dan situasi yang dapat mempengaruhi pilihan cara-cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, (e) aktor dikomando oleh nilai-nilai, norma-norma, ide-ide dalam menentukan tujuan yang diinginkan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut, (f) perilaku termasuk bagaimana aktor mengambil keputusan tentang cara-cara yang akan digunakan akan mencapai tujuan dipengaruhi ide-ide dan kondisi yang ada (Hanik, 2007:11). Teori ini juga merupakan salah satu teori komunikasi yang termasuk dalam kelompok teori umum atau general theories. Teori ini mempunyai ciri utama adanya suatu kepercayaan pandangan tentang berfungsinya secara nyata struktur yang berada di luar diri pengamat (Mahmud, 2011:43).

Dalam upaya menginterpretasikan makna fenomena sosial, menyingkap sebab-sebabnya, dan hal-hal yang mendasari fenomena sosial itu, maka para ilmuwan sosial ingin menduga asumsi-asumsi dalam yang berada di baliknya dan memungkinkan timbulnya aktifitas semacam itu.

Lahirnya Teori Struktural Fungsional

Teori fungsional struktural menurut Veeger (1990:16) memiliki suatu pemikiran dari August Comte (1798-1857) yang merupakan bapak Sosiologi. Tradisi August Comte dapat dilihat dari karyanya Herbert Spencer (1820-1903) (Veeger, 1990:36) dan Emile Durkheim (1857-1917) (Veeger, 1990:139). Struktural Fungsional muncul karena semangat Renaissance,

pada masa August Comte sekitar abad ke 17 M. Pada abad ini muncul kesadaran yang mula-mula beranggapan bahwa manusia tidak mempunyai otoritas untuk menjelaskan dan mengelola fenomena yang terjadi dalam masyarakat, semua sudah ditentukan oleh yang “di Atas”, kemudian dipahami aturan dari yang “di Atas” bukan selama-lamanya. Artinya ada “celah” yang diberikan oleh yang “di Atas “ kepada manusia untuk mengelolanya (Puspitasari, 2009:10).

Berbicara mengenai variabel-variabel berpola itu menekankan individu yang bertindak. Variabel-variabel digunakan untuk menggambarkan dan mengkategorikan struktur hubungan sosial yang bersifat umum dengan mana pelbagai kebutuhan dipenuhi. Karena itulah pendekatan Parsons ini dilihat sebagai teori fungsional dtruktural (Johnson, 1986:122).

Merton dalam Y Bunu mengatakan bahwa obyek analisis sosiologi adalah fakta sosial seperti; peranan sosial, pola-pola institusi, proses sosial, organisasi kelompok, pengendalian sosial, dan sebagainya. Mereka yang menganut teori ini cenderung memusatkan perhatian kepada fungsi dari satu fakta sosial terhadap fakta sosial yang lain. Meskipun menurut Merton, pengertian fungsionalisme struktural lebih banyak ditujukan pada fungsi-fungsi dibandingkan dengan motif-motif. Fungsi adalah akibat yang dapat diamati menuju adaptasi atau penyesuaian dalam suatu sistem (Bunu, 2012:26).

Asumsi Dasar Teori Fungsional Struktural

Masyarakat adalah sebuah kelompok yang di dalam masyarakat itu sendiri terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian-bagian tersebut fungsinya satu dengan yang lain berbeda-beda, tetapi masing-masing membuat sistem itu menjadi seimbang. Bagian-bagian itu saling mandiri dan mempunyai fungsional, sehingga jika satu diantaranya tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan suatu sistem. Hal inilah yang menjadi pemikiran Emile Durkheim dalam teorinya Parson dan Merton mengenal teori Struktural Fungsional. Emile Durkheim dalam teorinya struktural fungsional juga dipengaruhi oleh pemikiran Max Weber.

Ada dua aspek dari studi Max Weber dan pengaruhnya sangat kuat adalah: (1) Visi Substantif mengenai tindakan sosial, dan (2) Strateginya dalam menganalisa struktur sosial. Dalam pemikiran Max Weber tindakan sosial ini berguna dalam perkembangan pemikiran Parson dalam menjelaskan mengenai tindakan aktor dalam mempresentasikan keadaan. Pada tataran kelembagaan Talcott Parson berpendapat bahwa semua lembaga yang ada pada hakekatnya adalah suatu sistem dan setiap lembaga akan menjalankan empat fungsi dasar yang disebut A-G-I-L yang berasal dari empat konsep utama yang sangat penting dalam teori Struktural Fungsional, yaitu: *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration* dan *Latency* (Johnson, 1986:128-135).

Penekanan teori struktural fungsional adalah pada perspektif harmoni dan keseimbangan. Asumsi-asumsi dasar dari teori ini adalah: (1) Masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem yang kompleks, terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung, dan setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya; (2) Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan diri; sekalipun integrasi sosial tidak pernah tercapai dengan sempurna, namun sistem sosial akan senantiasa berproses ke arah itu; (3) Perubahan dalam sistem sosial umumnya terjadi secara gradual, melalui proses penyesuaian, dan tidak terjadi secara revolusioner; (4) Faktor

terpenting yang mengintegrasikan masyarakat adalah adanya kesepakatan di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai masyarakat tertentu; dan (5) Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan equalibrium. Struktural Fungsional merupakan teori yang mengacu pada asumsi bahwa: (1) Harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berinteraksi, dan (2) Hubungan yang ada dapat bersifat satu arah atau timbal balik (Rosyidi, 2006:11).

Tindakan sosial merupakan suatu proses, di mana aktor terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan subjektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah terpilih, yang kesemuanya itu dibatasi oleh kemungkinan-kemungkinan, oleh sistem kebudayaan dalam bentuk norma-norma, ide-ide, dan nilai-nilai sosial. Di dalam menghadapi situasi yang penuh dengan kendala atau hambatan, aktor mempunyai sesuatu di dalam dirinya berupa kemauan bebas.

Teori-Teori Struktural Fungsional

Teori Fungsionalisme Emile Durkheim (1858-1917) (Johnson, 1990:167)

Durkheim melihat “pendidikan sebagai pemegang peran dalam proses sosialisasi atau homogenisasi, seleksi atau heterogenisasi, dan alokasi serta distribusi peran-peran sosial, yang berakibat jauh pada struktur sosial yaitu distribusi peran-peran dalam masyarakat.

Durkheim memahami masyarakat dengan beberapa perspektif (pokok pikirannya) antara lain adalah: (1) setiap masyarakat secara relatif bersifat langgeng, (2) Setiap masyarakat merupakan struktur elemen yang terintegrasi dengan baik, (3) setiap elemen di dalam suatu masyarakat memiliki satu fungsi, yaitu menyumbang pada bertahanya sistem itu, dan (4) setiap struktur sosial yang berfungsi didasarkan pada konsensus nilai antara para anggotanya (Wirawan, 2006:47).

Durkheim memandang masyarakat sebagai keseluruhan organisasi yang memiliki realitas tersendiri dan memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian-bagian yang menjadi anggotanya agar tetap normal dan menjadi langgeng. Bilamana kebutuhan tidak terpenuhi maka akan terjadi keadaan yang “*patologis*” yang menunjuk pada ketidak seimbangan sosial. Oleh sebab itulah fungsionalisme selalu mengedepankan masalah ketertiban sosial. Ada tiga asumsi yang dianut oleh fungsionalisme yaitu: (1) realitas sosial dianggap sebagai suatu sistem, (2) proses sistem hanya dapat dimengerti dalam hubungan timbal balik antar bagian-bagian, (3) suatu sistem terikat dengan upaya mempertahankan integrasi (Soekamto, 1988:21). Teori fungsionalisme struktural pada dasarnya menginginkan masyarakat hidup dalam suasana damai dan stabil yang diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma masyarakat.

Teori fungsionalisme Durkheim sangat dipengaruhi oleh konsep organisme dari Comte. Dalam hal ini Durkheim mengajukan asumsi bahwa (1) masyarakat harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan, (2) bahwa bagian-bagian suatu sistem berfungsi untuk memenuhi kepentingan sistem secara menyeluruh, (3) kepentingan fungsional dipergunakan dalam kondisi normal dan patologis, untuk mencegah keadaan yang abnormal (Iskandar, 2006:43).

Durkheim (1938:96) berpendapat bahwa dalam suatu sistem masyarakat akan muncul adanya bahaya/gangguan. Untuk itu diperlukan analisis untuk mencari sebab-sebab terjadinya

suatu fenomena berdasarkan tujuannya. Durkheim memberikan prioritas pada analisis yang menyeluruh terhadap keadaan masyarakat dan memandang bagian-bagiannya mempunyai konsekuensi untuk mencari keadaan yang normal, di samping adanya bahaya/gangguan untuk mencapai tujuan.

Durkheim melihat masyarakat modern sebagai keseluruhan organis yang memiliki realitas secara mandiri. Keseluruhan itu memiliki kebutuhan tertentu dan harus dipenuhi oleh bagian-bagiannya yang menjadi anggotanya agar tetap menjadi langgeng, utuh, terjaga dan tetap normal. Jika kebutuhan tidak dapat terpenuhi maka akan berkembang keadaan yang patologis. Kebutuhan sekunder dalam hal ini sangatlah penting, misalnya kebutuhan pangan, sandang dan papan.

Jika kebutuhan sekunder tidak dapat terpenuhi maka dapat menimbulkan fluktuasi yang sangat keras, maka bagian ini akan dapat mempengaruhi bagian yang lain dari sistem itu dan akhirnya sistem sebagai keseluruhan. Para fungsionalis kontemporer menyebut keadaan normal sebagai *equilibrium*, atau sebagai suatu sistem yang seimbang, sedang keadaan patologis menunjuk pada ketidakseimbangan atau perubahan sosial (Puspitasari, 2009:10).

Fungsionalisme mempunyai pendapat bahwa suatu fakta sosial terjadi karena adanya kebutuhan akan ketertiban sosial. Oleh karena itu suatu sistem sosial dapat diprogramkan guna memenuhi tujuan-tujuan atau kebutuhan-kebutuhan tertentu sehingga mempunyai fungsi dalam membangun unsur-unsur masyarakat dan kebudayaan.

Durkheim memandang dan memperlakukan faktor-faktor sosial itu tidak hanya sebagai seperangkat fakta eksternal, yang dipertimbangkan individu, tetapi sebagai seperangkat ide, kepercayaan, nilai, dan pola normatif yang dimiliki individu secara subjektif bersama orang-orang lain dalam kelompoknya atau masyarakat keseluruhan (Johnson, 1986:112).

Jadi menurut Fungsionalisme, bahwa suatu fakta sosial terjadi karena adanya kebutuhan akan ketertiban sosial. Oleh karena itu suatu sistem sosial dianggap dapat diprogramkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau tujuan-tujuan tertentu sehingga mempunyai fungsi dalam membangun unsur-unsur kebudayaan /masyarakat. Cohen (1968) mengatakan bahwa analisis Durkheim terhadap masyarakat, seolah-olah membatasi ruang gerak warganya, yang tidak memiliki kekuatan untuk menolak perilaku kolektif dan norma-norma sosial yang diberlakukan kepadanya. Dalam hal ini individu dianggap sebagai obyek yang tidak memiliki kreatifitas untuk mengatur masyarakatnya, tetapi masyarakatlah yang dominan berperan untuk mengatur anggotanya.

Teori Fungsionalisme Struktural Merton

Merton adalah seorang ahli sosiologi terkemuka masa kini yang kritis terhadap gaya berteori Parsons yang abstrak dan agak muluk (*granddiose*) (Johnson, 1986:145). Merton dengan fasih mengemukakan bahwa para ahli sosiologi harus lebih maju lagi dalam meningkatkan disiplinnya dengan mengembangkan “teori-teori taraf menengah” (*theories of middle-range*) daripada teori-teori besar, sekurang-kurangnya pada tahap kematangan disiplin sekarang ini (Johnson, 1986:146).

Merton menaruh perhatian besar akan dampak suatu tindakan manusia terhadap masyarakat yang dapat bersifat fungsional, dalam arti meningkatkan fungsi masyarakat, tetapi

dapat pula bersifat disfungsional. Implikasi teori Merton mengajak untuk lebih waspada jika kita akan melakukan suatu tindakan, karenamungkin keberhasilan dalam bertindak itu justru akan menciptakan masalah yang berat.

Bagi Merton, pendekatan fungsional bukanlah suatu teori komprehensif dan terpadu, melainkan suatu strategi untuk analisa. Merton memperkenalkan beberapa kualifikasi dan pengecualian dari beberapa asumsi, implisit yang kelihatannya sudah dipergunakan oleh para fungsionalis. Ini termasuk dalam “paradigma”-nya untuk analisa fungsional yang pada intinya memberikan suatu daftar isian pertanyaan yang harus diingat oleh para fungsionalis dalam penelitiannya (Merton, 1968:39).

Merton menekankan tindakan-tindakan yang berulang kali atau yang baku yang berhubungan dengan bertahanya suatu sistem sosial di mana tindakan itu berakar (Merton, 1968:75). Merton tidak menaruh perhatian pada orientasi subjektif individu yang terlibat dalam tindakan seperti itu, melainkan pada konsekuensi-konsekuensi sosial objektifnya. Merton tetap mempertahankan suatu perbedaan yang tajam antara motif-motif subjektif (tujuan atau orientasi) individu dan konsekuensi sosial objektif itu memperbesar kemampuan sistem sosial itu untuk bertahan atau tidak, terlepas dari motif dan tujuan subjektif individu itu (Merton, 1968:76).

Merton dianggap mungkin mempunyai keahlian dibandingkan dengan ahli teori lainnya dia benar-benar telah mengembangkan secara mendasar pernyataan dan sangat jelas teori-teori fungsionalisme. Teori Merton ini diakui oleh beberapa ahli telah membawa dampak terhadap kemajuan ilmu pengetahuan sosiologis dan dapat mengatasi seluruh masalah-masalah sosial yang sedang berkembang pada saat ini. Merton merupakan salah satu tokoh yang melindungi dengan setia dari analisa fungsional yang mampu melahirkan suatu masalah yang sangat menarik dan cara berpikiryapun lebih efektif dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain.

Perhatian Robert K. Merton dipusatkan pada struktur sosial. Asumsi-asumsi teori fungsional Merton adalah: (1) Kesatuan fungsional masyarakat merupakan suatu keadaan di mana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik yang berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur; (2) fungsionalisme universal, asumsi ini menganggap bahwa “seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif”; (3) asumsi *indispensability*, yaitu “dalam setiap tipe peradaban setiap kebiasaan, ide, objek material, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan” (Khairani, 2014:84).

Robert K Merton mengatakan bahwa struktur yang ada dalam sistem sosial adalah realitas sosial yang dianggap otonom dan merupakan organisasi keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bergantung. Dalam suatu sistem terdapat pola-pola perilaku yang relatif abadi (Wirawan, 2012:50). Merton juga mengatakan bahwa struktur yang mempunyai tujuan dapat melahirkan fungsi manifes dan fungsi laten. Pada posisi ini Merton lebih banyak melihat hal-hal objektif dengan mengabaikan peristiwa-peristiwa yang subjektif. Merton mengkritik bahwa asumsi fungsionalisme cenderung konservatif dan lebih terpusat pada

struktur sosial dari pada perubahan sosial, dia menginginkan adanya keseimbangan fungsional (Khairanai, 2014:84).

Merton pada tahun 1948 menerima kritikan terhadap teori fungsionalisme struktural yang pernah dikembangkannya. Kritiknya antara lain adalah *Pertama*, mayoritas teori-teori Merton adalah masih bersifat konservatif yang terpusat pada struktur sosial dari pada perubahan sosial. *Kedua*, dengan menggunakan kekuatannya yang bersifat diskriptif, pendekatan Merton terlalu memusatkan diri pada struktur masyarakat dan memberikan tekanan pada status quo (Khairani, 2014:85).

Bagi Merton strategi analisis fungsional meliputi identifikasi serta analisa mengenai konsekuensi sosial objektif dari pola-pola perilaku tertentu. Konsekuensi-konsekuensi ini bersifat baik laten maupun *manifes*. Konsekuensi-konsekuensi itu mungkin menguntungkan sistem itu di mana mereka ada, atau disfungsional tertentu atau irelevan dengan persyaratan fungsional (Johnson, 1986:159).

Model fungsionalisme struktural merton dalam kata-kata Coser dan Rosenberg ini adalah pernyataan yang paling canggih yang ada pada dewasa ini. Merton menganalisa dengan model yang merupakan hasil perkembangan pengetahuan yang menyeluruh dari teori-teori klasik seperti Max Weber.

Weber mempunyai pengaruh yang dapat dilihat dalam batasan Merton mengenai birokrasi. Merton mengamati beberapa hal dalam birokrasi modern yang mengikuti Weber antara lain adalah: (1) Birokrasi merupakan struktur sosial yang terorganisir secara rasional dan formal, (2) Ia meliputi suatu pola kegiatan yang memiliki batas-batas yang jelas; (3) Kegiatan-kegiatan tersebut secara ideal berhubungan dengan tujuan-tujuan organisasi; (4) Jabatan-jabatan dalam organisasi diintegrasikan ke dalam keseluruhan struktur birokratis; (5) Status-status dalam birokrasi tersusun ke dalam susunan yang bersifat hirarkis; (6) Berbagai kewajiban serta hak-hak di dalam birokrasi dibatasi oleh aturan-aturan yang terbatas dan terperinci; (7) Otoritas pada jabatan, bukan pada orang; dan (8) Hubungan-hubungan antara orang-orang dibatasi secara formal (Mahmud, 2011:43).

Universitas, Akademi, Institut dan Organisasi-organisasi yang berskala besar memberikan kontribusi dan ilustrasi yang sangat baik mengenai model birokrasi yang diuraikan oleh Weber maupun Merton. Merton mempunyai paradigma dan analisa fungsional yang mencoba membuat batasan-batasan beberapa konsep analitis dasar dari segi analisa fungsional dan menjelaskan beberapa ketidakpastian arti yang terdapat di dalam postulat-postulat kaum fungsional. Dalam hal ini Merton mengutip tiga postulat yang terdapat dalam analisa fungsional yang kemudian disempurnakan satu per satu.

Postulat Pertama, adalah kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan di mana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konstitusi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik yang berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Merton menegaskan bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari suatu masyarakat adalah bertentangan dengan fakta. Merton menegaskan bahwa disfungsi (elemen disintegratif) tidak boleh diabaikan hanya karena orang begitu terpesona dengan elemen integratif (fungsi-fungsi positif).

Postulat Kedua, yaitu *Fungsionalisme Universal*, korelasi dengan postulat pertama. Fungsionalisme universal menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang

sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif (Merton, 1967:84). Fungsi positif maupun konsep disfungsi yang diperkenalkan oleh Merton menunjukkan bahwa beberapa perilaku sosial mempunyai sifat disfungsional. Anjuran Merton tentang elemen-elemen kultural seharusnya dipertimbangkan menurut kriteria keseimbangan konsekuensi fungsional (*net balance of functional consequences*), yang menimbang fungsi positif relatif terhadap fungsi negatif. Kita mengetahui bahwa Merton menganjurkan agar elemen-elemen kultural seharusnya dipertimbangkan menurut kriteria keseimbangan konsekuensi fungsional (*net balance of functional consequences*), yang menimbang fungsi positif relatif terhadap fungsi negatif.

Postulat ketiga, melengkapi trio postulat fungsionalisme, adalah postulat *indispensability*. Ia mengatakan bahwa dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, obyek materiil, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan, dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan (Merton, 1967:86).

Teori Fungsionalisme Talcott Parsons (1902) (Vegeer, 1990:199)

Teori Fungsional dari Parson (Parson, 1977:251) menganggap bahwa masyarakat pada dasarnya terintegrasi atas dasar kata sepakat para nggotanya akan nilai kemasyarakatan. Teori memandang sebagai suatu sistem secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu *equilibrium*. Dengan demikian teori ini disebut juga sebagai teori konsensus atau *integration theory* (Ellwood, 1988:23). Dalam perspektif Parsons pendidikan merupakan proses sosialisasi yang dalam diri individu-individu memungkinkan berkembangnya rasa tanggung jawab dan kecakapan-kecakapan (*commitment* dan *capacities*) yang semuanya diperlukan dalam melaksanakan peran sosial.

Penganut teori ini menggambarkan manusia dan masyarakat cenderung ke arah sudut deterministik. Manusia bertindak secara sengaja atau rasional, tetapi tindakan itu dikendalikan oleh internalisasi norma-norma sosial (Scott, 1976:718-735). Senada hal yang demikian diungkapkan oleh Merton dalam Y Bunu (Bunu, 2012:272) pilihan manusia dalam bertindak adalah pilihan yang tercipta secara struktural. Manusia digambarkan sebagai individu yang mampu memutuskan dan mencari sendiri pemusatan kebutuhannya, tetapi dibatasi oleh norma serta kondisi situasional (Bunu, 2012:27).

Teori fungsionalisme struktural parsons yang paling terkenal adalah skema *AGIL*. Yang memuat empat fungsi penting yang diperlukan untuk semua sistem "tindakan" yaitu (*Adaption; Goal attainment; Intregation; Latency*). Pada tataran kelembagaan Talcott Parson berpendapat bahwa semua lembaga yang ada pada hakekatnya adalah suatu sistem dan setiap lembaga akan menjalankan 4 (empat) fungsi dasar yang disebut A-G-I-L yang berasal dari empat konsep utama yang sangat penting dalam teori Struktural Fungsional, yaitu : *Adaptation, Goal Atainment, Intregation* dan *Latency* (Johson, 1986:128-135). Dengan empat persyaratan yang disebut sebagai model *AGIL* atau paradigma fungsi *AGIL*, maka dapatlah dipertahankan fungsi dan dapat memenuhi kebutuhan individu. Parson menilai bahwa sesungguhnya perilaku sebagai subsistem yang adaptif dan sebagai tempat bagi fasilitas manusia. Masing-masing sub sistem tersebut (sistem kultural sosial, kepribadian, dan organisme perilaku fungsional imperatif) yang disebut sebagai *AGIL* tersebut.

Adaption: (adaptasi), artinya sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem diharuskan menyesuaikan diri dengan lingkungan serta lingkungan itu dengan kebutuhannya. sistem sosial (masyarakat) selalu berubah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi, baik secara internal ataupun eksternal. *Adaption* yaitu merupakan fungsi penyesuaian diri yang berarti bahwa suatu sistem sosial jika ingin bertahan, maka harus ada struktur atau institusi yang mampu melaksanakan fungsi adaptasi terhadap lingkungan sekitar.

Goal Attainment: (pencapaian tujuan), artinya sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utama. setiap sistem sosial (masyarakat) selalu ditemui tujuan-tujuan bersama yang ingin dicapai oleh system sosial tersebut.

Goal Attainment ini adalah merupakan tujuan yang akan dicapai oleh suatu sistem yaitu kebutuhan sistem untuk memobilisasi sumber-sumber dan energi guna mencapai tujuan sistem dan menentukan suatu prioritas tujuan-tujuan tersebut.

Integration (integrasi), artinya sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian yang menjadi komponennya, sistem juga harus mengelola hubungan antar ketiga fungsi lainnya. setiap system selalu terintegrasi dan cenderung bertahan pada equalibrian (keseimbangan). Kecenderungan ini dipertahankan melalui kemampuan bertahan hidup demi system. *Integration* ini merupakan suatu kebutuhan guna mengkoordinasikan, menyesuaikan, mengendalikan relasi-relasi antar aktor, unit dalam sistem agar sistem tersebut tetap mempunyai fungsi.

Latency (pemeliharaan pola), artinya sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individu maupun pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. system sosial selalu berusaha mempertahankan bentuk-bentuk interaksi yang relatif tetap dan setiap perilaku menyimpang selalu diakomodasi melalui kesepakatan-kesepakatan yang diperbaharui secara terus-menerus. *Latency* merupakan suatu pola dari suatu sistem guna mempertahankan dari ancaman atau buday, supaya nilai-nilai dapat ditransformasikan dan konformitas dapat dipelihara.

Dalam penerapan skema AGIL dapat dilihat bahwa pada organisme perilaku yang merupakan sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri/mengubah lingkungan eksternal. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya. Sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai-nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak.

Asumsi Parsons adalah: (1) sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang saling tergantung, (2) sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan/keseimbangan diri, (3) sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan yang teratur, (4) sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian lain, (5) sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya, (6) alokasi dana integrasi merupakan dua proses fundamental yang diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem, (7) sistem cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan.

Dalam pemahaman ini menunjukkan bahwa secara sosiologis fungsi *latent* yang tidak disadari oleh penganut suatu agama seringkali penting bagi pengamatan perilaku

anggota masyarakat. Contohnya ibadah mempunyai tujuan secara manifes adalah menyembah, mengagungkan Tuhan. Seseorang yang benar secara ilmu ibadahnya maka akan mempunyai korelasi baik perilaku sosialnya. Baiknya perilaku sosial menunjukkan fungsi latent dari fungsi ibadah, dari fungsi pengabdian kepada Tuhan. Bagi sosiolog yang dianggap penting bukan ibadah atau ritualnya, tetapi dampak dari ritual tersebut terhadap perilaku sosial seseorang. Dalam hal ini Merton menekankan fungsi laten dan pemahaman orang tentang masyarakat akan meningkatkan bilamana tidak menutupi fungsi tersebut.

Penekanan teori struktural fungsional adalah pada perspektif harmoni dan keseimbangan. Asumsi-asumsi dasar dari teori ini adalah: (1) Masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem yang kompleks, terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung, dan setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya, (2) Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan diri; sekalipun integrasi sosial tidak pernah tercapai dengan sempurna, namun sistem sosial akan senantiasa berproses ke arah itu, (3) Perubahan dalam sistem sosial umumnya terjadi secara gradual, melalui proses penyesuaian, dan tidak terjadi secara revolusioner, (4) Faktor terpenting yang mengintegrasikan masyarakat adalah adanya kesepakatan di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai masyarakat tertentu, dan (5) Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan equalibrium. Struktural Fungsional merupakan teori yang mengacu pada asumsi bahwa: (1) Harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berinteraksi, dan (2) Hubungan yang ada dapat bersifat satu arah atau timbal balik (Rosyidi, 2006:11).

Tindakan sosial merupakan suatu proses, di mana aktor terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan subjektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah terpilih, yang kesemuanya itu dibatasi oleh kemungkinan-kemungkinan, oleh sistem kebudayaan dalam bentuk norma-norma, ide-ide, dan nilai-nilai sosial. Di dalam menghadapi situasi yang penuh dengan kendala atau hambatan, aktor mempunyai sesuatu di dalam dirinya berupa kemauan bebas.

Menurut pendapat Parson bahwa masyarakat mempunyai kelembagaan yang saling terkait dan tergantung satu sama lain. Setiap lembaga dalam masyarakat melaksanakan tugas tertentu untuk stabilitas dan pertumbuhan masyarakat tersebut. Sistem sosial meliputi kebudayaan, sosial, dan kepribadian itu saling tergantung. Semua itu merupakan sumber integrasi, sistem kepribadian untuk memenuhi pencapaian tujuan, sekaligus merupakan sistem kultural untuk mempertahankan pola-pola yang ada dalam sistem itu (Bunu, 2012:28).

Rocher dalam Bunu mengatakan bahwa sesungguhnya prasarat fungsional sebagai suatu kebutuhan sistem sosial agar dapat bertahan. Berbagai syarat itu antara lain (1) sistem sosial menyesuaikan diri dengan lingkungannya, (2) sistem sosial menyesuaikan diri dengan lingkungannya, (2) memiliki alat untuk memobilisasi sumbernya supaya dapat mencapai tujuan, (3) setiap sistem harus mempertahankan koordinasi internal di bagian-bagiannya dan mempertahankan kesatuannya, dan (4) setiap sistem mempertahankan diri dalam keadaan keadaan seimbang.

Asumsi dasar penggunaan teori fungsional struktural bahwa setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lainnya. Sebaliknya apabila struktur yang ada tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Dengan kata

lain struktur yang ada dalam masyarakat adalah bagi masyarakatnya, sedangkan apabila terdapat ketidak sesuaian dalam masyarakat maka akan dipahami bagaimana cara menyelesaikannya sehingga masyarakat tetap dalam keadaan seimbang (Bunu, 2012:28).

Mereka yang kurang setuju terhadap teori fungsional menuduh teori ini mengabaikan variabel konflik dan perubahan sosial dalam teori mereka. Mereka kurang memahami bahwa teori fungsional yang telah dilengkapi dengan konsep fungsi, disfungsi, fungsi laten, dan keseimbangan telah banyak memperhatikan pada persoalan konflik dan perubahan sosial. Dengan memperhatikan konsep ini akan membantu dalam memahami perubahan maupun dalam menganalisa struktur sosial. Parson beranggapan bahwa orang tidak akan mampu memahami perubahan sebelum memahami struktur sosial secara memadai, karena apabila hal itu tidak diperhatikan maka mereka hanya akan tertegun dengan keyeraturan dan mengabaikan konflik bagi perubahan sosial (Bunu, 2012:29).

Tidak ada sosiolog modern yang lebih sering disebut dan dikutip daripada Talcott Parsons (Veeger, 1990:199). Parsons mengatakan kalau satuan realitas sosial yang paling kecil terdiri dari peranan-peranan sosial, yang untuk sebagian dilembagakan, maka masyarakat dan tiap-tiap kehidupan bersama akan dipikirkan sebagai jaringan relasi-relasi atau sistem sosial. Parsons mengambil bagan masyarakat sebagai sistem sosial (Veeger, 1990:202). Parsons juga mengintroduser ke dalam sosiologinya dua ciri khas, yaitu: (1) Konsep *fungsi* yang dimengerti sebagai sumbangan kepada keselamatan dan ketahanan sistem sosial, dan (2) Konsep pemeliharaan keseimbangan, adalah ciri utama dari ciri utama dari tiap-tiap sistem sosial (Veeger, 1990:202).

Parsons memperhatikan bahwa bagian-bagian yang membnetuk satu sistem, saling bergantung. Independensi mencari-khaskan tiap-tiap sistem. Di dalamnya tidak ada unsur yang sama sekali terpisah satu dari yang lain. Perubahan dalam unsur yang mengandaikan dan saling membutuhkan, dan bersama-sama membangun suatu keseluruhan. Interpendensi ini mengarah kepada keseimbangan sebagai tujuannya, sedangkan keseimbangan itu cenderung untuk mempertahankan dirinya (Veeger, 1990:202).

Dalam analisisnya Parsons banyak menggunakan dan kerangka alat-tujuan (*means-ends framework*), Inti pemikiran Parsons adalah: (1) tindakan itu diarahkan pada tujuannya (atau memiliki satu tujuan); (2) tindakan terjadi dalam suatu situasi, dimana beberapa elemennya sudah pasti, sedangkan elemen-elemen lainnya digunakan oleh yang bertindak itu sebagai *alat* menuju tujuan itu; (3) secara normatif tindakan itu diatur sehubungan dengan penentuan alat dan tujuan. Komponen-komponen dari satuan tindakan adalah tujuan, alat, kondisi dan norma (Johnson, 1986:106). Parsons mengidentifikasi elemen-elemen yang penting dalam suatu perspektif teoritis yang lebih umum (Parsons, 1937:106).

Parsons berusaha memperlihatkan bahwa proses subjektif dalam mengevaluasi dan memilih alat atas dasar rasionalitas bukanlah satu-satunya tipe gejala subjektif yang secara implisit terdapat dalam model Marshall. Keinginan dan tindakan individu yang keluar dari proses itu mengandung suatu komitmen nilai nonekonomis yang tidak dapat dijelaskan dengan faktor-faktor sendiri yang mencerminkan lebih dari sekedar alat untuk memperbesar kesenangan atau keuntungan ekonomi (Parsons, 1937:164).

Menurut pandangan Ritzer (1988:327-328) karya monumental Talcott Parsons tentang struktur tindakan sosial yang juga terbit dalam masa yang disebutkan terakhir, sebenarnya

bisa disebut sebagai suatu rintisan ke arah mengintegrasikan kutub paradigma fakta sosial (*sosiologisme*) Durkheim dengan kutub paradigma definisi sosial (*sociology interpretativisme*) Weber. Hal ini tercermin dari perhatiannya pada unit tindakan, yang menurut Parsons mengandung empat komponen, yaitu: (1) aktor, (2) tujuan atau suatu keadaan masa depan ke arah mana tindakan itu diorientasikan, (3) situasi dimana tindakan itu terjadi, yang elemennya terdiri atas kondisi yang dapat dan tidak dapat dikendalikan oleh aktor; (4) nilai dan norma-norma yang oleh aktor digunakan untuk menentukan cara-cara pencapaian tujuan dari tindakan (Ritzer, 1988:328).

Ciri-ciri struktural dalam sistem sosial perspektif parsons

Tiap-tiap sistem sosial terdiri dari pola-pola perilaku tertentu. Perilaku itu mempunyai suatu struktur dalam dua arti. *Pertama*, relasi-relasi sendiri antara orang bersifat agak mantab dan tidak cepat berubah; *Kedua*, mereka mempunyai corak atau bentuk yang relatif tetap juga. Parsons menginventarisasikan kategori-kategori yang harus kita pakai untuk analisis sistem-sistem sosial, pengelompokan mereka dan perbandingan mereka satu sama lain. Kategori-kategori itu menggambarkan ciri-ciri pokok relasi-relasi dalam proses interaksi. Ciri-ciri itu diistilahkan dalam bentuk lima pasang yang masing-masing terdiri dari dua alternatif yang bertentangan satu terhadap yang lain. Sebetulnya individu yang berinteraksi tidak perlu memutuskan sendiri alternatif mana yang akan dipakai. Masyarakatlah atau kebudayaan setempat telah memilih untuk dia dan telah melembagakan salah satu alternatif mana yang akan menentukan corak interaksi. Kelima pasang itu dinamakan oleh Parson: (1) Perasaan (*affectivity*) atau netral perasaan (*affective neutrality*), (2) Arah dari (*self-orientation*) atau arah kolektivitas (*collectivity orientation*), (3) partikularisme atau universalisme, (4) Status bawaan (*iascription*) atau status perolehan sendiri (*achievement*) yang perlu diperhitungkan, dan (5) Campur-baur (*diffuseness*) atau tertentu (*specicity*) (Veeger, 1990:203).

Selain menginventarisasikan ciri-ciri struktural yang membeda-membedakan sistem sosial yang satu dari sistem sosial yang lain, parsons telah merumuskan pula empat prasyarat fungsional yang harus dicukupi oleh setiap masyarakat, kelompok, atau organisasi. Kalau tidak, sisitem sosial itu tidak akan dapat bertahan dan mesti berakhir. Tiap-tiap sisitem sosial, mulai dari negara besar sampai dengan keluarga batih, menghadapi empat masalah yang perlu ditanggulangi agar tidak lenyap. Kata Parsons, "Sesuai dengan teori umum, proses jalanya tiap-tiap sistem sosial tergantung dari empat imperatif atau "masalah" yang harus ditanggulangi secara memadai supaya keseimbangan dan/ atau keberadaan sistem itu dijamin" (Parsons, 1956:16). Keempat prasyarat atau masalah itu adalah: Adaptasi, Kemungkinan mencapai tujuannya, Integrasi anggota-anggotanya, dan Kemampuan mempertahankan identitasnya terhadap kegoncangan dan ketegangan yang timbul dari dalam (Veeger, 1990: 207).

Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Fungsional

Gejala-gejala dan kondisi pendidikan tidak pernah dapat dilepaskan dari sistem sosial. Dalam hal ini khususnya pendidikan Islam dalam nilai-nilai sosial harus menciptakan hubungan yang interaktif dan senantiasa menanamkan nilai-nilai sosial. Sedangkan dalam menerapkan nilai-nilai sosial dimasyarakat mengandung cara-cara edukatif (Mujamil Qomar,

2013:111). Pengelompokan serta penggolongan yang terdapat di masyarakat mempunyai peran, bentuk serta fungsi, konsep-konsep tersebut yang di pakai landasan dalam teori struktural fungsional.. teori ini mempunyai ekstrimisme yang terintegrasi dalam semua even dalam sebuah tatanan fungsional. Bagi suatu masyarakat, sehingga berimplikasi terhadap bentuk kepaduan dalam setiap sendi-sendi struktur dalam wilayah fungsional masyarakat. Pendidikan dalam era global saat ini juga mempunyai peran yang sangat besar dalam membentuk struktur maupun startifikasi sosial.

Dalam perspektif teori struktural fungsional mempunyai relevansi dengan pemikiran Emile Durkheim dan Weber, karena dua pakar sosiologi klasik ini terkenal dalam bidang fungsional struktural. Kemudian fungsional struktural dipengaruhi oleh karya dari Talcott Parson dan juga Merton, dua orang ahli sosiologi kontemporer yang sangat terkenal. Teori Struktural Fungsional tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan maupun masyarakat. Stratifikasi yang berada di masyarakat mempunyai fungsi. *Ekstrimisme* teori ini adalah mendarah dagingnya asumsi bahwa semua even dalam tatanan adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Berbicara tentang masyarakat maka hal tersebut tidak bisa dipisahkan dengan “integrasi” --satu kesatuan yang utuh, padu (Dahlan, 2001:264). Hal ini seperti yang telah dikemukakan Talcott Parsons dalam pengertian Sosiologi Pendidikan, yang berarti bahwa struktur dalam masyarakat mempunyai keterkaitan atau hubungan satu dengan yang lain. Pendidikan khususnya, tidak bisa dipisahkan dengan struktur yang terbentuk oleh pendidikan itu sendiri. Demikian pula, pendidikan merupakan alat untuk mengembangkan kesadaran diri sendiri dan kesadaran sosial (Wahyu, 2006:1).

Fungsionalisme Struktural tidak hanya berlandaskan pada sumsi-asumsi tertentu tentang keteraturan masyarakat, tetapi juga memantulkan asumsi-asumsi tertentu tentang hakikat manusia. Di dalam fungsionalisme, manusia diperlakukan sebagai abstraksi yang menduduki status dan peranan yang membentuk lembaga-lembaga atau struktur sosial. Didalam perwujudanya yang ekstrim, fungsionalisme struktural secara implisit memperlakukan manusia sebagai pelaku yang memainkan ketentuan-ketentuan yang telah dirancang sebelumnya, sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan masyarakat. Di dalam tradisi pemikiran Durkheim untuk menghindari reduksionisme, yaitu fenomena alamiah yang diciutkan dalam suatu hal yang lebih kecil (Dahlan, 2001:659). Psikologis para anggota masyarakat dipandang sebagai hasil yang ditentukan oleh norma-norma dan lembaga-lembaga yang memelihara norma-norma itu (Poloma, 2007:43). Kita dapat menghubungkan individu dengan sistem sosial dan menganalisisnya melalui konsep status (struktur) dan peran (fungsi). Status adalah kedudukan dalam sistem sosial (Poloma, 2007:171).

Peran pendidikan dalam teori struktural fungsional antara lain adalah: (1) Pendidikan dalam peranan kelompok. Peranan kelompok yang ada diharapkan dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan seseorang, hal ini akan membiasakan kebutuhan dan kepentingan serta mendekatkan harapan para anggota. Peristiwa ini diharapkan dapat menjadikan suatu asosiasi atau lapisan, strata maupun struktur masyarakat, baik secara kasta, golongan, statifikasi, kedaerahan, kelompok dan lain sebagainya di lingkungan masyarakat tertentu.

Kelompok sosial tersebut dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif, rukun, damai, saling menghormati, stabil, tertib, lancar dan sebagainya, maka pemimpinnya dari masing-masing anggota harus dapat bertindak dan dapat memainkan peranan-peranan

antara lain: (a) Dalam memainkan peranan kelompok tidak memaksakan peranan-peranan tersebut kepada para anggota kelompok lainnya, (b) Dalam memainkan peranan kelompok harus bersama-sama dengan kelompok yang lain, jika kelompok-kelompok itu telah membuat suatu kesepakatan bersama maupun perjanjian, maka dimungkinkan kelompok itu menjadi kelompok yang besar dan mengharapkan adanya perkembangan, (c) Tidak ada batasan peranan kelompok dan menyesuaikan dengan penanaman sosial dalam melakukan interaksi maupun hubungan antar kelompok dalam lingkungan masyarakat serta mengelola benturan dengan cara lebih menghargai dan menghormati peranan sosial. (2) Pendidikan dalam Peranan Masyarakat, yang terdiri dari: (a) Langkah-langkah yang harus ditempuh dan dilakukan bagi seseorang yang mendapat peran dan tugas kepemimpinan, (b) Menunjukkan perbuatan sebagai anggota anggota organisasi dari status kelompok/ perkumpulan maupun kelembagaan.

Anggota masyarakat jika sesuai dengan peranannya akan membatasi mengenai peranan (fungsi): misalnya sebagai orang tua, anggota militer, usahawan, pembentuk serikat kerja, konsumen, produsen, penduduk dan lain sebagainya. Hal tersebut mempunyai guna dan manfaat dalam pengendalian masyarakat, masing-masing akan mengetahui batas-batas kewenangannya, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat tidak akan terjadi konflik serta benturan peranan satu dengan yang lainnya, karena berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing.

1) Pendidikan dalam Status Kelompok Stuktural Sosial. Struktur masyarakat jika dilihat dari persilangan yang terjadi terdapat: (a) Kesukuan /Kedaerahan, (b) Kelas Sosial / Strata (struktur / lapisan) masyarakat, (c) Status Pekerjaan / Jenjang jabatan dalam bagian masyarakat.

Ada beberapa suku yang hidup dalam masyarakat tertentu, masing-masing dari masyarakat itu menunjukkan dan merasakan adanya ikatan suatu geografis maupun kebudayaan tertentu yang senada dan berlaku secara turun menurun serta para anggotanya dilahirkan, dikembangkan dan bertahan dalam kelngsungan hidupnya (viabilitas) persilangan-persilangan yang terjadi akan mewujudkan rasa kedaerahan. Kelas-kelas sosial merasakan juga adanya ikatan, tujuan, tuntutan, gerakan maupun jenjang, mereka akan mengadakan persilangan antara masing-masing keals dan akan mewujudkan segmentasi maupun pembentukan bagian yang semakin besar, dalam hal ini berbentuk lapisan masyarakat dan mempunyai pengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat.

Individu dalam masyarakat yang telah mencukupi umur haruslah bekerja sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing. Kenyataan ini menunjukkan interaksi antar sesama yang mempunyai status pekerjaan yang sama atau mirip sehingga dapat menimbulkan pertukaran pengalaman, penegetahuan, pikiran serta gagasan-gagasan penting. Persilangan-persilangan status pekerja/pekerjaan akan melahirkan jenjang pekerjaan yang lebih besar dalam masyarakat (Kreimers, 1984:33).

2) Pendidikan Dalam fungsi-fungsi Masyarakat.

Dalam lembaga menyelenggarakan berbagai macam fungsi, dalam lembaga keluarga memperhatikan dan memberikan perlindungan keluarga satu dengan yang lain, menyelenggarakan fungsi-fungsi ekonomi, ayah ibu dan kakak juga berfungsi sebagai

pengganti guru ketika berada di rumah, memberikan gizi dan obat-obatan serta gizi maupun pelayanan sosial-sosial lainnya.

Lembaga masyarakatpun juga mempunyai fungsi dan tugas yang serupa dengan lembaga keluarga. Dalam lembaga, fungsi-fungsi itu dipisah-pisah dan di bagi-bagi. Tidak dapat diperkirakan bahwa suatu fungsi sosial tertentu diselenggarakan secara eksklusif oleh suatu lembaga. Jika kita memahami pendidikan dengan seluruh kegiatan-kegiatannya, dimana anak-anak belajar dan dipelajari teknik-teknik, kebiasaan-kebiasaan serta perasaan-perasaan pada masyarakat dimana hidup, adalah nyata bahwa sekolah tidak melakukan monopoli atas pendidikan (Kreimers, 1984:220).

Aplikasi Fungsional Struktural dalam Pendidikan

Lembaga pendidikan didorong untuk melakukan manajemen transformatif, model dan gaya kepemimpinan yang diharapkan dan diperlukan di saat globalisasi ini adalah dengan “gaya kepemimpinan transformatif”. Lembaga pendidikan seharusnya mempunyai indikator dalam mengimplementasikan manajemennya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Muhyi Batu Bara bahwa Manajemen Pendidikan Mutu Berbasis Sekolah itu menjadi konsep dan juga merefleksikan dan peran serta tanggung jawab masing-masing pihak antara lain: (1) Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, (2) sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai, (3) sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat, (4) adanya harapan yang tinggi dari personil sekolah (kepala sekolah, guru, dan staf lainnya, termasuk siswa) (5) adanya pengembangan staf sekolah yang terus menerus sesuai dengan tuntutan IPTEK, (6) adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administrative, dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan dan atau perbaikan mutu, (7) adanya komunikasi dan dukungan insentif dan orang tua siswa dan masyarakat lainnya.

SIMPULAN

- 1) Pendidikan adalah proses guna mewujudkan kualitas sumber daya manusia secara utuh agar dapat melaksanakan peran dalam kehidupan kelompok maupun individual baik secara fungsional dan optimal,
- 2) Teori Struktural Fungsional adalah merupakan teori analisis yang memusatkan perhatian pada integrasi sosial, stabilitas sosial dan konsensus nilai. Penekanan teori Struktural Fungsional adalah pada perspektif keseimbangan dan keharmonisan. Tokoh-tokoh teori Struktural Fungsional adalah Talcott Parsons, Emilew Durkheim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Idi, 2011. *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Abudin Nata, 2012. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Bunu Y Helmut dan M Busro. 2012. *Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Surabaya: Jengala Pustaka Utama.
Dhurkheim, Emile, 1966, *Suicide : A Study in Sociology*, New York: The Press.
Doyle Paul Johnson, 1986, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid II*, terj. Robert M.Z. Lawang, Jakarta: PT. Gramedia.
Driyakarya, 1980. *Ilmu Tentang Pendidikan*, Yogyakarta: Yayasan Kanisius.

- Ellwood, 1988. *History of Social Philosophy*. New York: Prentice Hall Inc.
- G. Kartasapoetra, L.J.B. Kreimers, 1984. *Sosiologi Umum*, Jakarta: Bina Aksara.
- Hanik, Umi, 2007, *Interaksi Sosial Masyarakat Prural Agama*, Tidak diterbitkan, Ringkasan Disertasi, Malang: Universitas Merdeka.
- Idi, Abdullah, 2013. *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Iskandar, Syaifudin, 2006, *Konflik etnis Samawa dengan etnis Bali dalam perspektif kontruksi sosial masyarakat sumbawa*, Disertasi, Tidak Dipublikasikan. Malang: PPS Universitas Merdeka Malang.
- Johhson, Doyle Paul, 1990. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- K.J. Veeger, 1990, *Realitas Sosial, refleksi filsafat sosial atas hubungan individu masyarakat dalam cakrawala sejarah Sosiologi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Khairani Cut, 2014, *Warung Kopi Sebagai Media Interaksi sosial Masyarakat Aceh (Kajian realitas sosial Masyarakat kota Banda Aceh)*, Disertasi Tidak Dipublikasikan. Malang: PPs Universitas Merdeka Malang.
- Mere, Klemens, 2007. *Nilai-nilai budaya, fungsi, dan makna simbolik rumah adat keo dalam konteks perubahan masyarakat di desa lajawajo kecamatan mauponggo kabupaten Ngadha-Flores-Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)*, Malang, UNMER, Disertasi, tidak diterbitkan.
- Merton, Robert K, 1968, *Social Theory and Social Structure*, enlarged edition, New York : Free Press, 39.
- Muh Idris, 2012. Wawasan Manajemen Pendidikan Islam, *Jurnal Ta'allum*, 22(1): 21-38.
- Nasikun, 2011. *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Parsons, Talcott, 1937, *Structure of Social Action*, New York: McGraw-Hill.
- Parsons, Talcott, Smelser, N.J., 1956, *Economy and Society*, London,
- Poloma, Margaret, 2007. *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Rajawali.
- Purnomo Sidi, 2014. Krisis Karakter Dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2014(2):1-16.
- Purwanto, 2008. *Sosiologi Untuk Pemula*, Yogyakarta: Media Wacana.
- Puspitasai, Herien. 2009. *Teori Struktural Fungsional dan Aplikasinya dalam kehidupan Keluarga*, Bogor, ITB.
- Rendra Krisna, 2015. *Tradisi Petekan di Masyarakat Tengger, Studi Etnografi di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang*, Ringkasan Disertasi, Malang: Univeritas Merdeka.
- Scott, James C. 1976. *Moral Economy of Peasant: Rebellion and Subsystem in Southeast Asia*, Landon: New Haven.
- Soekanto, Soerjono, 1988. *Seri Pengenalan Sosiologi: Talcott Parsons, Fungsionalisme Imperatif*, Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional*. 2003., Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.
- Wirawan, Ida Bagus, 2006, *Migrasi Sirkuler Tenaga Kerja Wanita Keluar Negeri*. Ringkasan Disertasi. Tidak dipublikasikan, PPs. Universitas Airlangga Surabaya.